



# Jangan Korbankan Sektor Informal

## Desak Evaluasi Penataan Malioboro

**YOGYAKARTA, Joglo Jogja** - Penataan Malioboro kerap menimbulkan korban. Terutama, pelaku ekonomi informal yang mengais rezeki dari pengunjung Sumbu Filosofi tersebut. Kini, pengamendenterapis pijat yang mendapatkan perhatian dari DPRD Kota Yogyakarta.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Solihul Hadi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta

serius memberikan pendampingan terhadap pelaku ekonomi formal ini. Sebab, tiap ada penataan maka mereka selalu menjadi korban.

"Kami menekankan pentingnya akurasi program pendampingan. Agar para pelaku ekonomi sektor informal ini tidak merasa tersingkirkan oleh kebijakan pembangunan," kata politikus dari PKB ini, kemarin (27/1/2026).

■ Baca **JANGAN... Hal II**



DOK ISTIMEWALJOGLO.JOGJA  
**Solihul Hadi**  
Sekretaris Komisi D  
DPRD Kota Yogyakarta



PIKNIK: Pengunjung berwisata menggunakan becak motor atau bentor di kawasan Malioboro Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

ANRIAS FITRI/ATMOR-ANTARJALING.CO.ID

# Jangan Korbankan Sektor Informal

*sambungan dari hal Joglo Jogja*

Ia mengatakan, dengan ada pendampingan, pelaku ekonomi informal ini akan tetap bisa beraktivitas. Tanpa mengurangi pendapatannya.

“Program pendampingan dari Dinas Kebudayaan diharapkan menjadi jembatan agar nilai sejarah Sumbu Filosofis tetap terjaga tanpa memutus mata pencaharian warga lokal,” sarannya.

Ia mengatakan, adanya regulasi di kawasan pedestrian Malioboro berdampak terhadap pelaku usaha kecil dan seniman jalanan. “Saya yakin mereka bisa beradaptasi asalkan ada pendampingan

dari pemkot,” katanya.

Anggota Komisi D Tri Waluko Widodo meminta, ada inovasi berupa penyediaan titik khusus yang terintegrasi. Titik ini bisa mengakomodasi antara pelaku ekonomi informal maupun pengunjung ikon wisata di Kota Yogyakarta tersebut.

“Ke depan, para pengamen berbakat dan terapis pijat bersertifikat bisa diarahkan untuk menjadi ciri khas pedestrian Malioboro, sehingga penataan tidak hanya bicara soal estetika, tetapi juga pemberdayaan masyarakat,” kata Dodo, sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti menjelaskan, penataan kawasan Malioboro sebagai bagian dari Sumbu Filosofis berpedoman pada Peraturan Wali Kota (Perwal) No 13 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Malioboro.

“Regulasi tersebut mengatur agar tidak ada transaksi ekonomi langsung di area pedestrian. Fokus kami adalah pendampingan agar para pelaku aktivitas seni, seperti pengamen, dapat beraktivitas di titik-titik yang telah ditentukan secara tertib,” katanya. (eri/ amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005